

KONFLIK IRAN-IRAK SEBAGAI PEREBUTAN PENGARUH POLITIK, IDEOLOGI DAN KEPENTINGAN GLOBAL

Zulfan¹, Zaskia Nurfika Priani²

Universitas Sumatera Utara^{1,2}

Email: zulfanlubis2014@gmail.com¹, zaskianurfika@students.usu.ac.id²

Abstrak

Konflik Iran-Irak merupakan salah satu perang terbesar di kawasan Timur Tengah yang berlangsung pada tahun 1980–1988 dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ideologi, serta kepentingan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terjadinya konflik Iran-Irak, bentuk perebutan pengaruh politik dan ideologi antara kedua negara, serta keterlibatan negara-negara besar dalam konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Iran-Irak tidak hanya dipicu oleh sengketa wilayah dan perbatasan, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan ideologi pasca Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang menimbulkan kekhawatiran Irak terhadap penyebaran pengaruh revolusi tersebut. Selain itu, keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara-negara Barat maupun Arab memperlihatkan adanya kepentingan ekonomi dan geopolitik, terutama terkait pengaruh politik serta penguasaan kawasan Teluk Persia yang kaya akan sumber daya minyak. Konflik ini memberikan dampak besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, hubungan internasional, serta kondisi sosial dan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, konflik Iran-Irak dapat dipahami sebagai bentuk perebutan pengaruh politik, ideologi, dan kepentingan global yang saling berkaitan dalam dinamika politik internasional.

Kata Kunci: Ideologi, geopolitik, politik internasional, konflik iran-irak.

Abstract

The Iran–Iraq Conflict was one of the largest wars in the Middle East, taking place from 1980 to 1988 and influenced by various political, ideological, and global interests. This study aims to analyze the background of the Iran–Iraq conflict, the struggle for political and ideological influence between the two countries, and the involvement of major powers in the conflict. The research employs a qualitative method based on library research by utilizing various sources such as academic journals, books, articles, and relevant official documents. The findings indicate that the Iran-Iraq conflict was not only triggered by territorial and border disputes, but was also influenced by ideological differences following the 1979 Iranian Islamic Revolution, which

raised Iraq's concerns over the spread of revolutionary influence. In addition, the involvement of major powers such as the United States, the Soviet Union, as well as Western and Arab countries, demonstrated the existence of economic and geopolitical interests, particularly regarding political influence and control over the oil-rich Persian Gulf region. The conflict had significant impacts on the stability of the Middle East, international relations, and the social and economic conditions of both countries. Therefore, the Iran-Iraq conflict can be understood as a struggle for political influence, ideology, and global interests that were closely interconnected within the dynamics of international politics.

Keywords: *Ideology, geopolitics, international politics, Iran-Iraq conflict.*

A. Pendahuluan

Perang Teluk I yang berlangsung pada periode 1980–1988 antara Iran dan Irak merupakan salah satu konflik terbesar dan paling berdarah dalam sejarah Timur Tengah modern. Meskipun pemicu awal perang berkaitan dengan sengketa wilayah perbatasan, khususnya di kawasan Khuzestan dan jalur perairan Shatt al-Arab, faktor yang melatarbelakangi konflik ini jauh lebih kompleks. Perang tersebut tidak hanya melibatkan persaingan politik dan kepentingan strategis, tetapi juga dipengaruhi oleh pertentangan ideologi, identitas budaya, serta perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan dan tatanan masyarakat. Setelah terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini berupaya membangun negara berdasarkan prinsip Islam Syiah dan mengusung konsep wilayah al-faqih sebagai landasan kekuasaan politik. Sebaliknya, Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein mempertahankan ideologi nasionalisme Arab sekuler yang berakar pada Partai Ba'ath dan didominasi oleh elite Sunni. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan meningkatnya ketegangan politik antara kedua negara dan memperdalam rivalitas di kawasan Timur Tengah. Sejak Revolusi Islam Iran, konfigurasi politik dunia Islam juga semakin terpolarisasi antara kelompok yang dipimpin Iran dan kelompok yang didukung negara-negara Arab Sunni, sehingga Perang Teluk I menjadi representasi dari persaingan geopolitik yang lebih luas (Humaini, 2019).

Selain menjadi konflik militer, Perang Teluk I juga mencerminkan pertarungan simbolik yang berkaitan dengan identitas budaya dan sejarah. Pemerintah Iran memandang perang tersebut sebagai defa'-e moqaddas atau “perang suci” yang bertujuan melindungi revolusi Islam dari ancaman eksternal sekaligus mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Di sisi lain, Irak menggunakan istilah Qadissiyah Saddam untuk menggambarkan perang tersebut, merujuk pada kemenangan bangsa Arab atas Persia dalam sejarah awal Islam. Penggunaan simbol dan narasi sejarah ini menunjukkan bahwa konflik Iran-Irak tidak hanya didorong oleh kepentingan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan identitas antara bangsa Arab dan Persia yang telah berkembang selama berabad-abad. Menurut Selly dan Sumiyatun (2022), pecahnya Perang Teluk I tidak

semata-mata disebabkan oleh sengketa wilayah, melainkan juga oleh kekhawatiran Irak dan negara-negara Sunni terhadap penyebaran ideologi revolusioner Syiah pasca-Revolusi Iran. Dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Irak, baik dalam bentuk bantuan ekonomi maupun dukungan strategis, semakin memperlihatkan bahwa konflik ini telah melibatkan kepentingan politik internasional yang lebih luas.

Keterlibatan negara-negara Barat dalam perang tersebut memperlihatkan bahwa Perang Teluk I juga merupakan bagian dari dinamika hubungan antara Timur dan Barat. Amerika Serikat beserta sejumlah sekutunya memberikan dukungan tidak langsung kepada Irak sebagai upaya untuk membendung pengaruh Revolusi Islam Iran yang dianggap dapat mengganggu stabilitas kawasan dan mengancam kepentingan ekonomi, terutama terkait sumber daya minyak di Timur Tengah (Royan et al., 2023). Pandangan ini sejalan dengan temuan Ismael dan Ismael (1993) yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat Arab menilai perang tersebut sebagai hasil campur tangan kekuatan Barat yang berupaya melemahkan posisi politik dan militer negara-negara di kawasan. Dalam konteks domestik, Kirdi Dipoyudo (1983) menjelaskan bahwa pemerintah Iran memanfaatkan situasi perang untuk memperkuat legitimasi politik, meningkatkan solidaritas nasional melalui semangat keagamaan, serta menekan kelompok oposisi yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan. Sementara itu, Irak menghadapi berbagai persoalan ekonomi akibat perang berkepanjangan sehingga semakin bergantung pada dukungan finansial dari negara-negara Teluk dan negara-negara Barat.

Pada akhirnya, Perang Teluk I memberikan dampak yang luas terhadap hubungan antarnegara di Timur Tengah. Konflik ini mempertegas perbedaan antara kelompok Syiah dan Sunni serta memperluas pengaruh rivalitas tersebut ke berbagai negara, seperti Arab Saudi, Suriah, dan Lebanon. Ketegangan yang muncul tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya yang berakar pada perbedaan identitas keagamaan dan sejarah. Selain itu, keterlibatan kekuatan Barat dalam konflik tersebut turut memperkuat persepsi bahwa campur tangan pihak luar sering kali memperdalam perpecahan internal di dunia Islam. Oleh karena itu, Perang Teluk I dapat dipahami sebagai sebuah konflik yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teritorial dan politik, tetapi juga oleh pertarungan ideologi, budaya, dan kepentingan global yang membentuk dinamika kawasan Timur Tengah hingga masa berikutnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai konsep, teori, dan fakta historis mengenai konflik Iran–Irak yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Data penelitian tidak diperoleh melalui observasi lapangan, melainkan

melalui penelaahan literatur akademik yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta dokumen resmi dari lembaga internasional maupun institusi terkait. Seluruh sumber yang digunakan merupakan data sekunder yang memiliki kredibilitas akademik dan berkaitan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari database akademik, seperti Google Scholar, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Pemilihan sumber didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan topik penelitian, validitas sumber, serta tahun publikasi yang relatif terbaru agar informasi yang digunakan tetap relevan. Setelah data diperoleh, peneliti melakukan proses seleksi dan pengelompokan data sesuai fokus pembahasan, meliputi latar belakang konflik Iran dan Irak, pertentangan ideologi antara nasionalisme Arab dan Revolusi Islam Iran, serta keterlibatan negara-negara Barat dalam konflik tersebut.

Dalam proses analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan historis dan kritis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan konflik secara kronologis dari awal terjadinya hingga dampaknya terhadap kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk menelaah berbagai pandangan dan kepentingan politik yang memengaruhi jalannya konflik, termasuk peran aktor internasional dalam membentuk dinamika peperangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fakta-fakta sejarah, tetapi juga menganalisis hubungan antarperistiwa dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan aspek politik, ideologi, dan pengaruh luar negeri dalam konflik Iran-Irak. Data yang telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan interpretatif guna menemukan pola hubungan antar faktor yang menyebabkan konflik berlangsung dalam waktu yang panjang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Awal mula konflik Iran dan Irak

Perbatasan antara Irak dan Iran memisahkan dua negara dan dua budaya, yaitu Arab Irak dan Persia Iran, dengan sejarah konflik dan permusuhan yang berkejolak, dipicu oleh perpecahan agama (Muslim Sunni versus Syiah) dan sengketa perbatasan (ebsco.com). Perang antara Iran dan Irak adalah konflik militer yang sudah berlangsung sejak 1980-an. Awal mula konflik antara Irak dan Iran yaitu pada tanggal 22 September 1980, dimana kedua wilayah tersebut sejak lama saling memperebutkan pengaruh politik, ekonomi, dan kekuasaan di kawasan Timur Tengah (Nikolaiev et al., 2019). Dimulai dengan penyerbuan perbatasan Iran. Penyerbuan dari pinggir Irak bukan tanpa

alasan. Di situ ada wilayah kaya minyak bernama Khuzestan. Invasi kemudian meluas dengan merebut Kota Khorramshahr beberapa bulan kemudian (Royan et al., 2020). Menurut Agus N. Cahyo (2012), konflik antara Irak dan Iran memiliki akar sejarah yang sangat panjang sejak masa kerajaan kuno Mesopotamia dan Persia. Kedua wilayah tersebut sejak dahulu sering mengalami persaingan karena letaknya yang berdekatan sehingga memunculkan perebutan pengaruh, wilayah, dan sumber daya alam. Selain itu, hubungan keduanya juga dipengaruhi oleh persaingan identitas antara bangsa Arab di Irak dan bangsa Persia di Iran yang sama-sama ingin mempertahankan dominasi dan kekuatan masing-masing.

Konflik semakin berkembang karena adanya persoalan etnis dan politik di kedua negara. Iran memberikan dukungan kepada kelompok Kurdi di Irak, sedangkan Irak mendukung kelompok minoritas Arab yang berada di Iran. Dukungan terhadap kelompok minoritas tersebut menimbulkan ketegangan politik serta memperburuk hubungan kedua negara, dan ketegangan tersebut semakin berkembang ketika Revolusi Islam Iran tahun 1979 berhasil menggulingkan pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan melahirkan Republik Islam Iran yang membawa ideologi revolusioner berbasis Syiah ke dalam politik regional Timur Tengah (Afshon, 2021). Di samping itu, perbedaan ideologi dan kebijakan politik luar negeri juga menjadi faktor penting yang memperbesar konflik antara Irak dan Iran. Dengan demikian, perang Iran-Irak dapat dipahami sebagai konflik yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, etnis, politik, dan persaingan kekuasaan yang telah berlangsung selama berabad-abad (Agus N. Cahyo, 2012). Ditambah lagi Pemerintah Iran pada masa itu tidak hanya berfokus pada stabilitas domestik, tetapi juga berupaya untuk menyebarkan semangat revolusi Islam ke negara-negara lain, termasuk Irak yang memiliki populasi mayoritas Syiah namun dipimpin oleh rezim Sunni di bawah Saddam Hussein (Afshon, 2021).

Irak memandang penyebaran pengaruh revolusi Iran sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas politik dalam negerinya karena dikhawatirkan dapat memicu gerakan oposisi dari kelompok Syiah Irak terhadap pemerintahan Saddam Hussein (Al Sarhan, 2022). Selain faktor ideologi, juga terdapat perselisihan wilayah terutama terkait batas Sungai Shatt al-Arab juga menjadi penyebab utama meningkatnya ketegangan kedua negara, sebab kawasan tersebut memiliki nilai strategis penting dalam jalur perdagangan dan akses maritim minyak di Teluk Persia (Nikolaiev et al., 2019). Sungai shatt al-Arab terbentuk dari pertemuan Sungai Tigris dan Sungai Efrat yang secara historis merupakan perbatasan antara Iran dan Irak, yang memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan dan ekspor minyak kedua negara. Irak menganggap wilayah tersebut penting untuk

kepentingan ekonomi dan militernya, sedangkan Iran juga mengklaim hak atas daerah tersebut. Sehingga Presiden Irak Saddam Hussein juga ingin menegaskan kembali untuk kedaulatan Irak atas tepian Shatt al-Arab (Wikimedia Commons). Persaingan geopolitik antara Iran dan Irak juga dipengaruhi karena kedua negara untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah setelah melemahnya pengaruh kolonial Barat di wilayah tersebut (Afshon, 2021).

Di sisi lain, Irak kemudian mengambil langkah tegas dengan membatalkan Perjanjian Aljir 1975 secara sepihak karena menganggap kesepakatan tersebut lebih menguntungkan Iran dan merugikan kepentingan Irak, dan keputusan tersebut semakin memperburuk hubungan kedua negara dan menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya konflik terbuka antara Iran dan Irak (Nikolaiev et al., 2019). Kondisi politik Timur Tengah yang mengalami ketidakstabilan pasca Revolusi Islam Iran tahun 1979 turut membawa perubahan besar terhadap peta kekuasaan di kawasan tersebut (Al Sarhan, 2022). Revolusi yang terjadi di Iran tidak hanya mengubah sistem pemerintahan dalam negeri, tetapi juga memunculkan kekhawatiran di negara-negara Arab mengenai meluasnya pengaruh ideologi revolusi Islam yang dibawa Iran (Al Sarhan, 2022). Situasi ini kemudian mendorong munculnya rivalitas baru antara Iran dan negara-negara Arab, terutama Irak yang pada saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein dan berupaya mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah (Afshon, 2021). Pemerintah Irak menganggap bahwa pengaruh revolusi Iran dapat mengancam stabilitas politik dalam negeri Irak, khususnya karena mayoritas masyarakat Irak merupakan penganut Syiah yang dikhawatirkan akan terpengaruh oleh gerakan revolusioner Iran (Al Sarhan, 2022).

Ketegangan antara kedua negara terus meningkat seiring memburuknya hubungan diplomatik dan perselisihan mengenai wilayah perbatasan, terutama di kawasan Sungai Shatt al-Arab yang memiliki nilai strategis bagi perdagangan dan distribusi minyak kedua negara (Nikolaiev et al., 2019). Keputusan tersebut semakin memperburuk hubungan kedua negara dan menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya konflik terbuka antara Iran dan Irak (Nikolaiev et al., 2019). Ketegangan terjadi ketika Irak melancarkan serangan militer ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980 dengan alasan mempertahankan keamanan nasional serta mencegah meluasnya pengaruh Revolusi Islam Iran ke kawasan Arab (Nikolaiev et al., 2019). Serangan tersebut kemudian menjadi awal pecahnya Perang Iran-Irak yang berlangsung selama delapan tahun dan menyebabkan kerugian besar bagi kedua negara, baik dari segi politik, ekonomi, maupun kemanusiaan (Al-Ansari et al., 2020). Konflik ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor militer semata, tetapi juga berkaitan erat

dengan persoalan identitas agama antara Sunni dan Syiah, perebutan pengaruh politik di Timur Tengah, kepentingan ekonomi terutama sektor minyak, serta rivalitas geopolitik yang telah berlangsung lama antara Iran dan Irak (Al-Ansari et al., 2020).

2. Bentur Ideologi Nasionalisme Arab dengan Revolusi Islam

Ideologi memiliki peran sangat penting dalam membentuk ketahanan politik dan sosial Iran setelah Revolusi Islam 1979. Setelah revolusi, Iran tidak hanya berubah dalam sistem pemerintahan, tetapi juga membangun identitas negara yang berlandaskan ideologi Islam revolusioner dan anti-imperialisme. Melalui semboyan “Tidak Timur, Tidak Barat, Republik Islam”, pemimpin revolusi Ayatollah Ruhollah Khomeini menegaskan bahwa Iran menolak dominasi dua kekuatan besar dunia saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Prinsip tersebut menjadi dasar kebijakan luar negeri Iran yang menekankan kemandirian dan penolakan terhadap campur tangan asing (Asyer et al., 2025). Dalam perkembangannya, Ali Khamenei melanjutkan ideologi tersebut dengan menempatkan perlawanan terhadap Barat sebagai bagian dari kewajiban religius sekaligus nasional. Akibatnya, masyarakat Iran dibentuk untuk memiliki pola pikir bahwa negaranya terus berada dalam ancaman kekuatan asing (Asyer et al., 2025). Kondisi ini dapat dipahami sebagai *siege mentality* atau mentalitas terkepung, yaitu keadaan ketika masyarakat merasa negaranya selalu diserang atau ditekan pihak luar. Namun di sisi lain, kondisi tersebut justru memperkuat solidaritas nasional dan patriotisme masyarakat Iran. Ideologi negara kemudian digunakan sebagai alat untuk membangun legitimasi politik pemerintah. Berbagai tekanan internasional, terutama sanksi ekonomi dari Barat, dipresentasikan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan sebagai bentuk perjuangan mempertahankan kedaulatan negara dan kehormatan Islam. Dengan demikian, penderitaan ekonomi dipahami sebagai pengorbanan demi mempertahankan identitas nasional dan kemerdekaan politik Iran.

Hal ini terlihat jelas dalam isu program nuklir Iran. Pemerintah Iran menjadikan program nuklir bukan hanya sebagai proyek teknologi, tetapi juga sebagai simbol kemajuan bangsa, dan kemandirian ilmu pengetahuan, serta martabat nasional. Karena itu, banyak masyarakat tetap mendukung program tersebut walaupun sanksi internasional berdampak pada kehidupan ekonomi mereka. Survei dari University of Maryland tahun 2019 menunjukkan bahwa mayoritas warga Iran tetap bangga terhadap kemampuan nuklir domestik negaranya dan menolak penghentian program tersebut meskipun kondisi ekonomi sedang sulit (Asyer et al., 2025). Dukungan ini menunjukkan bahwa propaganda ideologis negara

berhasil membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Dari sudut pandang sosial-politik, kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana ideologi dapat menjadi alat resistensi nasional. Pemerintah Iran berhasil menghubungkan identitas agama, nasionalisme, dan perjuangan politik menjadi satu kesatuan narasi. Akibatnya, masyarakat tidak hanya melihat konflik dengan Barat sebagai persoalan politik internasional, tetapi juga sebagai perjuangan mempertahankan harga diri bangsa dan keyakinan agama. Sikap rela bertahan dalam tekanan ekonomi demi mempertahankan prinsip negara menunjukkan terbentuknya ketahanan psikologis masyarakat yang kuat terhadap tekanan eksternal. Demikian, dapat dipahami bahwa ideologi pascarevolusi bukan hanya menjadi dasar pemerintahan Iran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mobilisasi sosial dan legitimasi politik. Ideologi tersebut membentuk cara pandang masyarakat terhadap musuh eksternal, memperkuat nasionalisme religius, serta menciptakan solidaritas kolektif dalam menghadapi tekanan internasional.

Sangat kontras dengan Irak, Kemunculan ISIS tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik Irak yang mengalami ketidakstabilan setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Invasi tersebut menyebabkan melemahnya pemerintahan Irak serta memunculkan berbagai kelompok bersenjata yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Dalam situasi tersebut, kelompok Al-Qaeda di Irak yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi berkembang menjadi kekuatan militan yang semakin besar. Setelah mengalami perubahan kepemimpinan dan struktur organisasi, kelompok ini kemudian berubah menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di bawah pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi. ISIS memanfaatkan konflik di Irak dan Suriah untuk memperluas wilayah kekuasaan serta membangun konsep “khilafah Islamiyah” yang didasarkan pada interpretasi radikal terhadap syariat Islam (Rijal, 2017). Perkembangan ISIS berlangsung sangat cepat karena organisasi ini memanfaatkan media sosial dan internet sebagai alat propaganda modern. Melalui platform digital seperti Twitter, Telegram, dan YouTube, ISIS menyebarkan ideologi, merekrut anggota, serta membangun citra kekuatan organisasi kepada masyarakat internasional. Strategi komunikasi digital yang digunakan ISIS menjadikan kelompok ini berbeda dari organisasi radikal sebelumnya karena mampu menjangkau masyarakat global secara lebih luas dan cepat. Penyebaran propaganda tersebut akhirnya membuat pengaruh ISIS meluas hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia (Rijal, 2017).

Selain berdampak pada aspek keamanan, perkembangan ISIS juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan

keagamaan masyarakat. Ideologi radikal yang dibawa ISIS meningkatkan kekhawatiran terhadap penyebaran ekstremisme, terutama di kalangan anak muda yang aktif menggunakan media sosial. Dalam perspektif sosiologi, fenomena ISIS menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas kelompok dan penyebaran ideologi transnasional. Melalui komunikasi digital, ISIS mampu membangun rasa solidaritas dan identitas bersama di antara para pendukungnya meskipun berasal dari latar belakang negara dan budaya yang berbeda (Huda, 2020). Fenomena ISIS juga memperlihatkan hubungan yang erat antara konflik politik, agama, dan perkembangan media modern. Konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang melatarbelakangi munculnya ISIS, sedangkan perkembangan teknologi informasi membantu organisasi tersebut memperluas pengaruhnya secara global. Oleh karena itu, ISIS tidak hanya dipahami sebagai organisasi teroris semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial-politik yang berkembang melalui jaringan komunikasi global dan propaganda media digital (Transborders, 2018).

Benturan ideologi yang kuat antara Iran dan Irak membuat kedua negara ini mendukung terjadinya konflik yang semakin rumit. Setelah terjadinya Revolusi Iran tahun 1979, Iran berubah menjadi negara Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini dengan ideologi Islam revolusioner berbasis Syiah. Revolusi tersebut membawa semangat anti-Barat dan gagasan untuk menyebarkan revolusi Islam ke negara-negara lain di Timur Tengah. Kondisi ini dianggap sebagai ancaman besar bagi Irak yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein dengan ideologi nasionalisme Arab dan pemerintahan Partai Ba'ath yang cenderung sekuler (Soltanzadeh & Othman, 2013). Pemerintah Irak khawatir bahwa semangat Revolusi Iran dapat memengaruhi masyarakat Syiah di Irak untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Saddam Hussein. Kekhawatiran tersebut semakin besar karena Irak memiliki populasi Syiah yang cukup banyak, sedangkan elite politik Irak saat itu didominasi kelompok Sunni. Oleh sebab itu, Saddam Hussein memandang Iran bukan hanya sebagai ancaman militer, tetapi juga ancaman ideologis yang dapat menggoyahkan stabilitas politik Irak (Hamid, 2023).

Benturan ideologi tersebut kemudian semakin terlihat dalam propaganda politik dan media selama Perang Iran-Irak berlangsung pada tahun 1980–1988. Iran menggunakan media untuk menyebarkan gagasan solidaritas Syiah dan menyerukan rakyat Irak agar melawan pemerintahan Ba'ath Saddam Hussein. Akan tetapi, propaganda Iran tidak sepenuhnya berhasil karena masyarakat Syiah

Irak tetap memiliki identitas nasional Irak yang kuat. Dalam hal ini, Irak berhasil membangun propaganda tandingan dengan menekankan nasionalisme Arab serta menggambarkan Iran sebagai ancaman bagi dunia Arab (Kalantari, 2022). Saddam Hussein juga memanfaatkan sejarah dan simbol agama untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya. Irak menyebut perang melawan Iran sebagai “Saddam’s Qadisiyyah”, merujuk pada kemenangan bangsa Arab terhadap Persia dalam sejarah Islam. Melalui propaganda tersebut, Saddam berusaha membentuk narasi bahwa perang Iran-Irak merupakan konflik antara bangsa Arab dan Persia, bukan sekadar konflik politik biasa. Strategi ini digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme Arab sekaligus memperoleh dukungan dari negara-negara Arab lainnya (Lewental, 2014).

Di sisi lain, Iran memandang perang tersebut sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan Revolusi Islam. Ayatollah Khomeini menekankan bahwa perang melawan Irak merupakan bentuk jihad dan perlawanan terhadap rezim yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam revolusioner. Ideologi ini membuat Iran mampu mempertahankan semangat perjuangan masyarakatnya meskipun perang berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa (Soltanzadeh & Othman, 2013). Dalam perspektif sosiologi politik, konflik Iran-Irak menunjukkan bagaimana ideologi dapat menjadi alat mobilisasi massa sekaligus memperkuat identitas nasional dan keagamaan. Iran menggunakan identitas Syiah revolusioner sebagai alat solidaritas politik, sedangkan Irak menggunakan nasionalisme Arab untuk mempertahankan legitimasi negara. Benturan ideologi tersebut memperlihatkan bahwa konflik internasional tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh identitas, agama, media, dan propaganda politik yang berkembang di masyarakat (Nikolaiev et al., 2019).

3. Pengaruh Negara-Negara Barat Terhadap Konflik

Sebagai negara besar, tentu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Seperti Irak dan Iran, pasti memerlukan dan menerima bantuan dari Negara-negara yang memiliki pengaruh besar. Perang Iran–Irak yang berlangsung pada tahun 1980–1988 pada awalnya merupakan konflik antara dua negara yang saling memperebutkan pengaruh dan wilayah perbatasan. Namun, seiring berjalannya waktu, perang tersebut berkembang menjadi konflik internasional karena melibatkan kepentingan negara-negara besar, terutama negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Keterlibatan negara-negara Barat tidak terlepas dari pentingnya kawasan Timur Tengah sebagai pusat penghasil minyak dunia serta letaknya yang strategis dalam politik

internasional (Selly & Sumiyatun, 2022). Negara-negara Barat memandang konflik Iran–Irak sebagai kesempatan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Mereka khawatir apabila salah satu negara memenangkan perang secara mutlak, maka negara tersebut akan menjadi kekuatan dominan yang dapat mengancam kepentingan Barat di kawasan. Oleh karena itu, negara-negara besar berusaha mempertahankan kondisi agar tidak ada pihak yang terlalu kuat maupun terlalu lemah. Strategi ini dilakukan demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri (Walker, 2011).

Amerika Serikat pada awalnya lebih mendukung Irak karena menganggap Revolusi Islam Iran tahun 1979 sebagai ancaman serius bagi pengaruh Barat di Timur Tengah. Revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini membawa perubahan besar dalam sistem politik Iran dengan menerapkan pemerintahan Republik Islam yang bersifat anti-Barat dan anti-Amerika. Pemerintah Iran secara terbuka menolak campur tangan Barat dan menyerukan perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sikap tersebut menyebabkan hubungan Iran dengan negara-negara Barat menjadi tegang (Putra et al., 2025). Sebagai bentuk dukungan kepada Irak, Amerika Serikat memberikan bantuan berupa informasi intelijen, teknologi militer, bantuan ekonomi, dan dukungan diplomatik. Dukungan tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi Irak dalam menghadapi Iran yang dianggap dapat menyebarkan pengaruh revolusi Islam ke negara-negara lain di Timur Tengah. Selain itu, Amerika Serikat juga ingin memastikan bahwa jalur perdagangan minyak di kawasan Teluk Persia tetap aman dan tidak berada di bawah pengaruh Iran (Kosasih, 2019).

Namun, dalam perkembangan perang, Amerika Serikat juga tidak menginginkan Iran mengalami kekalahan total. Sebaliknya, Iran tunduk pada blokade oleh Amerika Serikat, di mana Inggris menerapkan sejumlah pembatasan ekonomi, melarang penjualan komoditas penting, dan mengusir semua karyawannya dari ladang minyak Iran. Akibatnya, ekonomi Iran berkontraksi sebagai akibat dari penurunan keuntungan ekspor minyak. Karena tekanan blokade Amerika dan ketidakpuasan dengan Revolusi Islam Iran, negara-negara lain ragu-ragu untuk mendukung Iran. Ketika posisi Iran mulai melemah, dan dengan mempertahankan kondisi konflik yang seimbang, Penetapan resmi embargo, Amerika Serikat juga secara diam-diam menyediakan Iran dengan senjata selama Perang Teluk Pertama. Misalnya Adnan Khashoggi bertindak sebagai perantara untuk kesepakatan militer ilegal antara Iran dan Amerika Serikat. Antara 1985 dan 1988, Amerika Serikat secara diam-diam

memasok Iran dengan 1.000 tonse nti-tank dan radar (Nugraheni 2021).

Amerika Serikat dapat tetap menjaga pengaruh politik dan strategisnya di kawasan tersebut (Walker, 2011). Selain Amerika Serikat, negara-negara Barat lainnya seperti Inggris dan Perancis juga ikut terlibat melalui penjualan senjata dan kerja sama militer dengan pihak-pihak yang bertikai. Keterlibatan mereka dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, terutama karena kawasan Teluk Persia merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Ketika perang meluas hingga ke wilayah perairan Teluk, banyak negara khawatir pasokan minyak internasional akan terganggu. Oleh sebab itu, negara-negara besar berusaha menjaga stabilitas kawasan demi melindungi kepentingan ekonomi dan energi mereka (Selly & Sumiyatun, 2022). Negara-negara Barat memanfaatkan konflik tersebut untuk memperluas pengaruh politik, menjaga akses terhadap sumber daya minyak, dan mempertahankan posisi strategis mereka di Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah sering kali tidak dapat dipisahkan dari campur tangan dan kepentingan negara-negara besar dunia (Walker, 2011). Menjadi bagian dari persaingan politik global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Keterlibatan kedua negara adidaya tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan pengaruh kekuasaan di kawasan Timur Tengah yang dikenal memiliki cadangan minyak bumi sangat besar. Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memiliki ideologi berbeda pada akhirnya sama-sama ikut campur dalam konflik demi mempertahankan pengaruh mereka di kawasan strategis tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik Iran–Irak berkembang menjadi arena perebutan kepentingan internasional, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan akses terhadap sumber daya minyak dunia (Surwandono, 2013).

Amerika Serikat memandang Iran pascarevolusi 1979 sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan Barat karena pemerintahan Iran menerapkan ideologi anti-Barat dan anti-Amerika. Oleh sebab itu, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Irak yang dipimpin Saddam Hussein melalui bantuan persenjataan, intelijen, dan dukungan diplomatik untuk membendung pengaruh Iran. Di sisi lain, Uni Soviet juga terlibat dengan memberikan bantuan militer demi mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Keterlibatan kedua negara besar tersebut menunjukkan bahwa Perang Iran–Irak dapat dipahami sebagai bentuk proxy war, yaitu perang yang dimanfaatkan negara-negara besar untuk mencapai kepentingan politik dan

strategis mereka tanpa terlibat langsung dalam peperangan (Surwandono, 2013).

D. Penutup

Konflik Iran dan Irak pada dasarnya merupakan konflik yang dipengaruhi oleh persaingan politik dan perebutan kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Pertentangan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama antara Syi'ah dan Sunni, tetapi lebih banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dan ideologi dari masing-masing negara yang berusaha mempertahankan pengaruhnya. Seiring berjalannya waktu, konflik tersebut berkembang menjadi perpecahan sosial, ideologi, dan politik yang semakin memperumit kondisi kawasan Timur Tengah. Selain itu, munculnya perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan, demokrasi, liberalisme, dan bentuk kekuasaan negara juga memperbesar ketegangan di masyarakat. Ideologi Barat seperti demokrasi dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan karakter politik masyarakat Timur Tengah yang lebih terbiasa dengan sistem pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, konflik di Timur Tengah tidak hanya dipicu oleh persoalan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh persaingan politik, perbedaan ideologi, dan perebutan kepentingan kekuasaan di kawasan tersebut.

Berdasarkan penelitian, keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang memperpanjang konflik Iran-Irak. Amerika Serikat memandang Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kepentingan ekonominya, terutama terkait pengaruh politik dan sumber daya minyak di Timur Tengah, sehingga memberikan dukungan kepada Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui bantuan politik, ekonomi, dan militer, serta kebijakan embargo terhadap Iran yang turut memengaruhi jalannya perang. Campur tangan negara asing dalam konflik ini menyebabkan persaingan politik dan militer semakin tajam, sehingga perang berlangsung dalam waktu yang lama dan menimbulkan kerugian besar bagi kedua negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik Iran-Irak memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan banyaknya korban jiwa, sehingga konflik tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana persaingan politik, ideologi, dan kepentingan internasional dapat memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afshon, O. (2021). Iran's geopolitics and revolutionary export: The promises and limits of the proxy empire. *Orbis*, 65(1), 152–171.
- Ajeng Aliya Virgina, Fadhilah Zahrotunnisa, & Jihan Athaya Nabila Hendrawan. (2025). Perang Teluk sebagai konflik ideologi dan budaya di Timur Tengah, 18(2), 1-13.
- Al-Ansari, N., Adamo, N., Knutsson, S., & Sissakian, V. K. (2020). The water-energy-food nexus: A holistic approach for resource security in Iran, Iraq, and Turkey. *Water-Energy Nexus*, 3, 81–94.
- Al-Musawi, A. S. (1989). *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*. Bandung: Mizan.
- Al Sarhan, A. S. (2022). Economic dimension in Iran's foreign policy towards Iraq: 2003–2020. *New Political Science*, 44(2), 324–335.
- Huda, S. (2020). Melacak Geneologi dan Dampak Gerakan ISIS Bagi Keberagamaan Islam di Indonesia. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 4(1), 1–12.
- Munirah, & Sumiati. (2019). "Syi'ah dan Sunni dalam Perspektif Pemikiran Islam." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(02).
- Muttaqin, M. Z. (2018). Ideologi: Faktor konflik dan kegagalan Timur Tengah.
- Nikolaiev, S., Yuskiv, K., & Velychko, O. (2019). Overview of conflicts between Iran and Iraq. *International Relations, Public Communications and Regional Studies*, 2, 97–107.
- Nuralisa, R., Hotima, D. P., & Ukas. (2024). Analisis prinsip non intervensi hukum internasional dalam konteks Perang Teluk I antara Irak-Iran.
- Rijal, N. K. (2017). Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 45–60.
- Rijal, N. K. (2017). The Evolution of ISIS in Indonesia With Regards to Its Social Media Strategy. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(2), 123–138.
- Sahide, A. (2020). *Syi'ah Sunni dalam Konstelasi Politik Timur Tengah*. Yogyakarta: UMY Press.
- Sami', I. A. (2006). *Pengkhianatan-Pengkhianatan Syiah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Selly, & Sumiyatun. (2022). Keterlibatan Amerika Serikat di bidang ekonomi dan militer dalam Perang Teluk I antara Irak-Iran (1980–1988), 6(1).
- Sukabdi, Z. A. (2015). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 1–15.
- Transborders. (2018). Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia. *Transborders: International Relations Journal*, 2(1), 35–50.